



MATERI PKN

Untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi

MATERI PKN

Untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi

Tim Penulis:

Serly Febriyanti, Cintia Dwi Mustika, Ghozy Amirulloh Halim,
Najwa Faridah Mahmud, Lutfi Fadhilah Syukur, Mutia Mariska,
Yasifa Iqlima Azzahra, Neng Ayu Sulastri, Sindi Anggraeni,
Syafna Camila Putri Utami, Nandar Abdul Jabbar, Ira Nuraini,
Santi Rizki Fitriyani, Rahma Rahmatunisa.



MATERI PKN UNTUK MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI

Penulis:

**Serlyi Febriyanti, Cintia Dwi Mustika, Ghozy Amirulloh Halim,
Najwa Faridah Mahmud, Lutfi Fadhilah Syukur, Mutia Mariska,
Yasifa Iqlima Azzahra, Neng Ayu Sulastri, Sindi Anggraeni,
Syafna Camila Putri Utami, Nandar Abdul Jabbar, Ira Nuraini,
Santi Rizki Fitriyani, Rahma Rahmatunisa.**

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Ella Dewi Latifah, M.Pd.

ISBN:

978-623-459-686-1

Cetakan Pertama:

September, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul Materi PKN Untuk Mahasiswa Di Perguruan Tinggi telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Materi PKN Untuk Mahasiswa Di Perguruan Tinggi.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Materi PKN Untuk Mahasiswa Di Perguruan Tinggi. *Civic education, citizenship education, democracy education*, mempunyai peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang intelek, bertanggung jawab serta beradab. seperti yang dilakukan hampir oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia dalam peranan pendidikan kewarganegaraan.

Sejalan dengan itu Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia harus menjadi tanggung jawab setiap komponen bangsa yaitu pemerintah, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, serta masyarakat industri secara menyeluruh. Didalam Undang-Undang Sisdiknas di sana hanya mengatur Pendidikan Kewarganegaraan bagi pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi serta untuk pendidikan non formal. Karena itu, pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal ditujukan kepada peserta didik yang dibentuk dan diproses melalui kegiatan pembelajaran. Sementara Pendidikan Kewarganegaraan bagi masyarakat umum dirancang dan dibentuk secara bebas, secara ekstra kurikuler (diluar kurikulum) dan bertahap melalui proses program sosialisasi dengan berbagai macam pola media yang ada di masyarakatnya itu sendiri.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

September, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEMBAHASAN	
MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pembahasan	2
BAB 2 MEMBANGUN NEGARA BERKEADABAN	11
A. Pengertian Negara.....	11
B. Unsur-Unsur Negara.....	12
C. Hakikat Negara	14
D. Tujuan Negara	15
E. Teori Tentang Terbentuknya Negara.....	17
F. Bentuk-Bentuk Negara	19
BAB 3 KONSTITUSI DAN PERUNDANG-UNDANGAN	
DALAM KEHIDUPAN KENEGARAAN	23
A. Pendahuluan.....	23
B. Pembahasan	24
BAB 4 IDENTITAS NASIONAL	35
A. Pendahuluan.....	35
B. Pembahasan	36
BAB 5 DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF	
PARA PENDIRI BANGSA, PENDIDIKAN DAN ISLAM	45
A. Pendahuluan.....	45
B. Pengertian Demokrasi	45
C. Penutup	66
BAB 6 SENTRALISASI, DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	69
A. Pendahuluan.....	69
B. Pembahasan	70
BAB 7 GOOD AND CLEAN GOVERNANCE	81
A. Pendahuluan.....	81
B. Pembahasan	82
BAB 8 HAK ASASI MANUSIA (HAM) INDONESIA	91
A. Pendahuluan.....	91
B. Pembahasan	92
C. Penutup	100

BAB 9 IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA	
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI	103
A. Pendahuluan	103
B. Pembahasan	104
C. Kesimpulan	114
BAB 10 KETAHANAN NASIONAL	117
A. Pendahuluan	117
B. Pembahasan	117
BAB 11 POLITIK STRATEGI NASIONAL DI INDONESIA	127
A. Pendahuluan	127
B. Pembahasan	128
BAB 12 PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME	143
A. Pendahuluan	143
B. Pembahasan	144
BAB 13 MASYARAKAT MADANI	153
A. Pendahuluan	153
B. Masyarakat Madani	154
PROFIL PENULIS	162



PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PEMBAHASAN MATERI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Serly Febriyanti dan Cintia Dwi Mustika

A. PENDAHULUAN

Status kewarganegaraan merupakan hal yang esensial bagi setiap individu untuk memperoleh jaminan hak dari suatu negara. Negara Republik Indonesia membuka kesempatan kepada orang asing untuk menjadi Warga Negara Indonesia melalui pewarganegaraan atau naturalisasi. Salah satu persyaratan naturalisasi adalah sehat jasmani dan rohani berdasarkan Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Persyaratan tersebut dapat menjadi hambatan bagi setiap orang yang memiliki permasalahan disabilitas untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Dalam penelitian ini, syarat sehat jasmani dan rohani ditinjau dari perspektif hukum internasional, yaitu melalui *Universal Declaration of Human Rights*, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), *Covenant on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), dan *General Comments Adopted by the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights*. Selain itu, syarat sehat jasmani dan rohani juga ditinjau dari perspektif hukum nasional, yaitu melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, Undang-Undang Kewarganegaraan, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Kovenan internasional tidak mengatur syarat sehat jasmani dan rohani secara komprehensif, sedangkan dalam sumber hukum nasional, syarat sehat

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mencakup kajian empat pilar kebangsaan meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/28/080000669/kewarganegaraan-arti-sejarah-jenis-dan-macamnya>
<https://osf.io/ndpxv/download#:~:text=PKn%20memiliki%20ruang%20lingkup%20meliputi,dan%20Politik%2C%20Pancasila%20dan%20Globalisasi>
<https://dosenppkn.com/pendidikan-kewarganegaraan/>
Jamalong, Ahmad dan Sukino. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: alfabeta



MEMBANGUN NEGARA BERKEADABAN

Ghozy Amirulloh Halim

A. PENGERTIAN NEGARA

Secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status atau *statum* (bahasa latin klasik) adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap, sejak cicero (104-103), kata status atau *statum* itu lazim di artikan sebagai *setanding* atau *station* (kedudukan) dan di hubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana diartikan dalam istilah status *civitatis* atau status *republicae*.¹

Kata latin klasik tersebut dialihkan ke dalam beberapa istilah lainnya, seperti *staat* (bahasa Belanda dan Jerman), *state* (inggris), *etat* (prancis).² Istilah stat mula-mula dipergunakan pada abad 15 di eropa barat dan istilah itu tumbuh seiringan dengan pertumbuhan dengan negara yang oleh Kaisar Romawi Ulpainus pernah memakai *statum* dalam ucapannya "*publicum ius est quad ad statum rei romance spectac*".³

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, organisasi pokok dari kekuasaan politik, dan alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan manusia-manusia dalam masyarakat.⁴ Disisi lain negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat

1 Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi hal 108

2 Idem.

3 Idem.

4 Miriam Budiarmo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2001, halm 38-39

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukhtie Fadjar Negara hukum dan perkembangan teori hukum: sejarah dan pergeseran paradigma (Malang: Intrans Publishing, 2018)
- Budiyanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas X*. Jakarta: Erlangga
- C. Humphrey Wadlock dlama jawathir Thontowi &Peranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontenporer (bandung, refika aditama, 2006)
- <https://kumparan.com/kabar-harian/bentuk-kerja-sama-indonesia-dengan-negara-lain-di-berbagai-bidang-1wRXpUideST>
- <https://www.gramedia.com/literasi/teori-terbentuknya-negara-dan-bentuk-bentuk-negara/>
- Jhon lock dalam a, Mukhtie Fajar, tipe negara hukum (malang. Banyumedia 2005)
- Miriam Budiarmo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2001)
- T Jawahir, P Iskandar - Refika Aditama, hukum kontenporer, Bandung, 2006
- Ujang Charda, 2019, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk perguruan tinggi*, Depok: rajawali pers.



KONSTITUSI DAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KEHIDUPAN KENEGARAAN

Najwa Faridah Mahmud

A. PENDAHULUAN

Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai kenegaraan²⁵. Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim di sebut undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap Hak asasi Manusia (HAM) dan mengatur tentang distribusi kekuasaan (Distribution of power) dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar. Aturan dasar nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lainnya yang ada dibawahnya.

Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat di ubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, yang tujuannya adalah menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum bersifat umum terutama pembentukan undang-undang.²⁶

²⁵ Tim penyusun, *kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 457.

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Ctk keempat, Nusa Media Bandung, hlm 180.

3. Memilih ketua persiapan kemerdekaan Indonesia Ir. Soekarno sebagai presiden dan wakil ketua Drs. Muhammad Hatta sebagai wakil president.
4. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu di bantu oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi komite nasional

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul, *Konstitusi dan kelembagaan Negara*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999
- Daud, abu Busro dan Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999
- Kansil, C.S.T., et.al., *Konstitusi-Konstitusi Indonesia Tahun 1945-2000*, Jakarta: Sinar Harapan, 2001
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Ctk keempat, Nusa Media Bandung, hlm 180.
- Jilmy Asshiddiqie, *konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia*. Mahkamah Konstitusi RI Jakarta, 2004, hlm, 29.
- Maulana Arafat Lubis, *Pembelajaran PPKn di SD/MI Kelas Rendah*, (Bandung, 2019), hlm.73-75
- <https://aljumhuriy.blogspot.com/2016/04/konstitusi-dan-tata-perundang-undangan.html>
- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-konstitusi/>



IDENTITAS NASIONAL

Lutfi Fadhilah Syukur

A. PENDAHULUAN

Identitas nasional berkaitan dengan nilai-nilai, sejarah, dan cita-cita yang mengidentifikasi suatu kelompok masyarakat dalam suatu ikatan. Identitas nasional sebagai ciri khas yang mana bisa membedakan suatu bangsa dari bangsa yang lain, maksudnya dengan definisi dari identitas nasional bahwa dikatakan identitas nasional sebagai pembeda, ciri-ciri, dan jati diri suatu bangsa. Salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika identitas nasional adalah globalisasi. Globalisasi dimaknai sebagai kebebasan masyarakat dunia dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, nilai-nilai, dan budaya. Dalam berbagai kepentingan, manusia tidak bisa bekerja sendiri tetapi sangat diperlukan kebersamaan yang lebih luas antara manusia dengan manusia yang lain. Hasil dari kajian penelitian menunjukkan bahwa identitas nasional sebagai penentu karakter bangsa Indonesia dengan perilaku kebarat-baratan yang cenderung pragmatis, hedonis, dan konsumtif. Ideologi tersebut bertentangan dengan ideologi Pancasila yang mengancam bagi bangsa Indonesia dalam penguatan identitas nasional. Karena itu, perlu upaya untuk memperkuat identitas nasional khususnya pada penerus bangsa yang sudah terekspos dengan budaya barat. masyarakat Interaksi dunia yang semakin mudah menyebabkan proses transmisi nilai-nilai budaya. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan berbagai referensi baik sumber primer maupun sekunder yang relevan dengan penguatan identitas nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- ICC UIN, Demokrasi, hak asasi manusia dan madani, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kerja sama dengan Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 23.
- Ibid., hlm. 25.
- Asyukri Ibn Chamim, et. Al., Civic education, pendidikan kewarganegaraan (Yogyakarta: Ditlitbang Muhammadiyah dan LP3 UMY. 2003), hlm. 209.
- Kaelan (ed), pendidikan kewarganegaraan...Op. Cit., hlm. 43.
- Idem.
- M. Ganjar Ganeswara, et. Al., pendidikan kewarganegaraan (Bandung: UPI Press, 2007), hlm. 27.
- Benny Irawan, et. Al., pendidikan kewarganegaraan (serang: BKS PTN-BARAT, 2015, hlm. 10.
- Ibid., hlm. 11.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/07/00000061/karakteristik-identitas-nasional-menurut-smith>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/05/00000071/pancasila-sebagai-identitas-nasional>.
- <http://dewdewutari.blogspot.com/2013/06/pancasila-sebagai-pandangan-hidup.html>, akses <http://relenie.wordpress.com/2013/04/23/pancasila-sebagai-ideologi-bangsa-dan-negara-indonesia>
- <http://www.pengertianahli.com/2013/05/pengertian-pancasila-sebagai-dasar-htmi>
- <http://research.amikom.ac.id/index.php/STI/article/view/6961/5259>
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1177681>



DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF PARA PENDIRI BANGSA, PENDIDIKAN DAN ISLAM

Mutia Mariska

A. PENDAHULUAN

Demokrasi dianggap sebagai suatu sistem politik oleh banyak masyarakat dunia sebagai yang terbaik dalam mencapai tujuan bernegara. Menurut UNESCO tahun 1949 "...Untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh."

Kata demokrasi terkesan memang akrab dan seakan mudah dimengerti begitu saja. Namun apa dan bagaimana sebenarnya makna dan hakikat substansi demokrasi mungkin belum sepenuhnya dimengerti dan dihayati, sehingga untuk itu bagian ini akan menjelaskan tentang apa sebenarnya makna dan hakikat demokrasi, konsep dasar demokrasi, prinsip dan indikator demokrasi, dan arti pentingnya pendidikan demokrasi.

B. PENGERTIAN DEMOKRASI

Demokrasi secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" (rakyat) dan "*cratos*" (kekuasaan). Jadi secara etimologis (bahasa) demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Sri Poerbasari dan Paulus Ishak Londo (ed.), Gagasan-Gagasan Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia Dalam Lingkaran Diskusi Persatuan Alumni GMNI, (Jakarta: Persatuan Alumni GMNI, 2015)
- Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Jakarta:Gramedia.
- Fitriacida Azhari, Aidul. 2005. Menemukan Demokrasi. Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ghazali, Muchtar. Pendidikan kewarganegaraan. 2014.
- Huntington, Samuel. 1997. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta:Pustaka Utama Graffiti.
- Latif, Yudi (June 2011). Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mubyarto (ed.), Ir. Soekarno: Indonesia Menggugat, (Yogyakarta: Aditya Media dan PUSTEP UGM, 2005)
- Nurtjahjo, Hendaria. 2006. Filsafat Demokrasi. Jakarta: Bumi Aksara Pembinaan Kebangsaan Indonesia.
- Print, Murray et al. 1999. Civic Education for Civil Society. London: Asian Academic Press.
- Suseno, Franz Magnis. 1997. Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis. Jakarta: Gramedia.
- Saefulloh Fatah, Eep. 1994. Demokrasi di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemantri, Sri. 1974. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Bandung: Alumni 1974 Print
- Sukarna. 1981. Demokrasi Versus Kediktatoran. Bandung: Alumni.
- Tim ICCE UIN. 2003. Pendidikan Kewargaan. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media.
- William Ebenstein, Isme-Isme yang Mengguncang Dunia: Komunisme, Fasisme, Kapitalisme, Sosialisme, diterjemahkan dari judul asli Today Isms: Communism, Fascism, Capitalism, Socialism, (Yogyakarta: Narasi, 2014)
- Zamroni. 2001. Paradigma Pendidikan Masa Depan, Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Zulfikri Suleman, Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta, (Jakarta: KOMPAS, 2010)



SENTRALISASI, DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

Yasifa Iqlima Azzahra

A. PENDAHULUAN

Sentralisasi dan desentralisasi adalah dua jenis struktur yang dapat ditemukan dalam organisasi, pemerintah, manajemen dan bahkan dalam pembelian. Sentralisasi Wewenang berarti kekuatan perencanaan dan pengambilan keputusan secara eksklusif berada di tangan manajemen puncak. Ini menyinggung konsentrasi semua kekuatan di tingkat puncak. Di sisi lain, desentralisasi mengacu pada penyebaran kekuasaan oleh manajemen puncak ke manajemen tingkat menengah atau rendah. Ini adalah pendelegasian wewenang, di semua tingkatan manajemen. Pengertian Sentralisasi adalah sistem manajemen yang memusatkan seluruh wewenang sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak dalam struktur organisasi kepada satu manajer umum. Dalam bidang pemerintahan, pengertian sentralisasi adalah suatu sistem pemerintahan saat segala kekuasaan dan wewenang dipegang oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah pusat adalah presiden dan kabinetnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sentralisasi adalah penyatuan segala sesuatu ke suatu tempat (daerah dan sebagainya) yang dianggap sebagai pusat. Sederhananya, sentralisasi adalah sistem pemerintah yang semua kekuasaan berada di pusat. Sebenarnya sentralisasi adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai pengaturan kewenangan. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi digunakan pada

DAFTAR PUSTAKA

<https://m.mediaindonesia.com/humaniora/556246/pengertian-dan-perbedaan-sentralisasi-dan-desentralisasi>

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/asas-desentralisasi>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5826007/desentralisasi-sebagai-sistem-pemerintahan--begini-penjelasan-nya>. Desentralisasi adalah: Pengertian, Contoh, Kelebihan (majoo.id)



GOOD AND CLEAN GOVERNANCE

Neng Ayu Sulastri

A. PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, dan teratur. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, dan juga karena adanya pengaruh globalisasi. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terselenggaranya good governance merupakan tujuan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat serta cita-cita berbangsa dan bernegara.⁶² Situasi dan kondisi ini harus adanya kepemimpinan nasional yang diharapkan mampu menjawab tantangan bangsa Indonesia mendatang. Perkembangan situasi nasional ini dicirikan dengan tiga fenomena yang dihadapi, yaitu: (1) Permasalahan yang semakin kompleks, (2) Perubahan yang sedemikian cepat, dan (3) Ancaman bencana yang relatif tinggi (bencana alam yang silih berganti, situasi ekonomi yang tak

⁶²https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ppid.bandung.go.id/%3Fmedia_dl%3D23172&ved=2ahUKewjTxYn_ndn9AhXt3nMBHfurBMwQFnoECCOQAQ&usg=AOvVaw2rF6g-X5LWy79jMy4Y26QI, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 22.40.

DAFTAR PUSTAKA

- Humando, Y. (2021). KAJIAN IMPLEMENTASI GOOD AND CLEAN GOVERNANCE DI PROPINSI KALIMANTAN TENGAH. 5(2).
<https://mputantular.ac.id/ojs/hukum/index.php/yurehumano/article/view/101>, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 22.31.
- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://ppid.bandung.go.id/%3Fmedia_dl%3D23172&ved=2ahUKEwjTxYn_ndn9AhXt3nMBHfurBMwQFnoECC0QAQ&usg=AOvVaw2rF6g-X5LWY79jMy4Y26QI, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 22.40. Sudiro "PEMERINTAHAN YANG BERSIH: ANTARA ASA DAN REALITA".
- https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/download/748/652&ved=2ahUKEwcmq7Tv8v9AhVtSWwGHc_aD5wQFnoECCgQAQ&usg=AOvVaw3UvI4HbPVVXq0WIXZz0huy, diakses pada 08 Maret 2023 pukul 11.31. GOOD AND CLEAN GOVERNANCE: TATA KEKOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH
- Pertemuan_9SN0020249.pdf (syekhnurjati.ac.id), diakses pada 18 Maret 2023 pukul 10.55. Pengertian Good Governance: Sejarah, Tujuan, dan Implementasinya
- <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-good-governance/amp/&ved=2ahUKEwi8nNTRnNv9AhXYArcAHUEcABEQFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw3sQp5VQWCd-YgmM5-g1qmE>, diakses pada 14 Maret pukul 17.38. Good Governance : Pengertian dan Prinsip-Prinsipnya
- <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/edu/detikpedia/d-5766029/good-governance--pengertian-dan-prinsip-prinsipnya/amp>, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 17.36. Rohayani, Ida. Modul PPKn kelas
- <https://bappeda.tanjungbalaiikota.go.id/menju-clean-goverment-dalam-negara-demokrasi/>, diakses pada 30 Juni 2023 pukul 17.51. Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih dan Berwibawa - Bratapos.com, diakses pada 30 Juni 2023 pukul 18.14



HAK ASASI MANUSIA (HAM) INDONESIA

Sindi Anggraeni

A. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia di Indonesia adalah kumpulan hak yang dijamin oleh konstitusi dan hukum di Indonesia yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hak asasi manusia di Indonesia mencakup hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak-hak khusus bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti hak-hak perempuan, anak-anak, dan orang dengan disabilitas. Beberapa hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum di Indonesia antara lain hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas kebebasan bersuara, hak atas perlindungan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang sehat, serta hak atas kesetaraan di depan hukum. Namun, implementasi hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh aparat keamanan dan pihak-pihak yang berwenang. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia, tanpa terkecuali, yang diakui secara universal dan dijamin oleh hukum. Di Indonesia, hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi dan hukum yang berlaku, seperti UUD 1945, Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada dasarnya, hak asasi manusia meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak-hak khusus bagi kelompok-kelompok tertentu. Hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan hukum di Indonesia meliputi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak atas kebebasan bersuara, hak atas perlindungan hukum, hak atas

DAFTAR PUSTAKA

- Hak asasi manusia di Indonesia <https://g.co/kgs/Ta61qo>
- Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi Karangan Dr. Ujang Charda S., S.H., M.H., M.I.P. Hal (203-209)
- Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Pendidikan Tinggi Karangan Dr. Ujang Charda S., S.H., M.H., M.I.P Hal (210-211)
- <https://umsu.ac.id/hak-asasi-manusia/>
- <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/28/100000079/sejarah-perkembangan-ham-di-indonesia>
- <https://www.kompas.com/stori/read/2021/12/28/100000079/sejarah-perkembangan-ham-di-indonesia>
- <https://www.bola.com/ragam/read/5103310/macam-macam-upaya-penegakan-ham-di-indonesia>
- <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7804/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>
- <https://bandungbergerak.id/article/detail/1998/kekerasan-seksual-termasuk-pelanggaran-ham-berat>
- <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/J-PERLINDUNGAN-HAK-MINORITAS.pdf>
- <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/17/2065/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital.html>
- <https://spkep-spsi.org/2020/01/10/pelanggaran-ham-dalam-hubungan-kerja/>
- <https://www.sembilanbintang.co.id/perkembangan-ham-di-dunia-internasional-maupun-di-indonesia/#:~:text=Sejarah%20HAM%20atau%20Hak%20Asasi,hak%20kebebasan%20dan%20hak%20milik>



IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Syafna Camila Putri Utami

A. PENDAHULUAN

Setiap negara memiliki tujuan, cita-cita, dan visi bangsa yang menjadi landasan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitupun Indonesia yang masyarakatnya meliputi berbagai etnis atau suku. Maka untuk mewujudkannya diperlukan wawasan nusantara sebagai cara pandang nasional bagi seluruh rakyatnya.

Wawasan Nusantara dirumuskan sebagai cara pandang bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila, tentang diri dan lingkungannya serta tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan segala aspek kehidupannya yang beragam dan dinamis dengan mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia yang tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian, pada hakikatnya Wawasan Nusantara merupakan suatu keterpaduan pemikiran yang memiliki dua dimensi yaitu dimensi kedaerahan atau kewilayahan dan dimensi nasional serta dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka merealisasikan cita-cita bangsa.

Wawasan nusantara sering digunakan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan kebijaksanaan, keputusan, atau tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku ajar Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Mahasiswa, Kogoya Willius hlm. 70
- <https://www.gramedia.com/literasi/wawasan-nusantara/> Sabtu, 01 Juli 2023 06.21
- <https://deepublishstore.com/blog/materi/wawasan-nusantara/> Sabtu, 01 Juli 2023 15.45
- <https://www.kompasiana.com/amp/tiarasyafriana/62b2eb8679016911726f7a82/implementasi-kehidupan-nusantara-dalam-sehari-hari> Sabtu, 01 Juli 2023 15.15



KETAHANAN NASIONAL

Nandar Abdul Jabbar

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dan ketahanan nasional saling berkaitan dan saling bergantung. Keberhasilan pembangunan nasional akan mampu meningkatkan ketahanan nasional, dan sebaliknya ketahanan nasional yang kuat akan semakin memacu laju pembangunan nasional. Keuletan dan ketangguhan, yang meliputi kemampuan membangun kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan hidup dan tujuan negara, merupakan inti dari ketahanan nasional. Pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam segala aspek kehidupan nasional secara seimbang dan serasi merupakan inti dari gagasan ketahanan nasional Indonesia. Memahami keamanan nasional sebagai suatu kekhasan negara Indonesia yang dimanfaatkan untuk dapat mengatasi segala bentuk dan jenis bahaya yang ada merupakan hal pertama yang harus diingat untuk memahami konsep ketahanan nasional. Pemahaman mengenal ketahanan nasional selalu akan dihubungkan dengan ajaran Asta Gatra.

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai *national resilience*. Dalam terminologi Barat, terminologi yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional, dikenal dengan istilah *national power* (kekuatan nasional).

DAFTAR PUSTAKA

- Asroni Ahmad. Kewarganegaraan. (2022): Get Press.
- Ayu Nyoman. Modul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi. (2021): Nilacakra.
- Depublish. Zakat Sebagai Ketahanan Nasional. (2018): Deepublish.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1177681>
- Made Desak. BUKU AJAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI. (2021): Literasi Nusantara.
- Nurcholis, H. (2009). Perencanaan partisipatif pemerintah daerah: pedoman pengembangan perencanaan pembangunan partisipatif pemerintah daerah. Indonesia: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Setiyowati Rini. dkk. Pendidikan Kewarganegaraan: Bening Media Publishing.
- Winarno. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi. (2019). Indonesia: Bumi Aksara.
- Zaenal Fanani. dkk. KETAHANAN NASIONAL, REGIONAL DAN GLOBAL: - . (2018): UMMPress.



POLITIK STRATEGI NASIONAL DI INDONESIA

Ira Nuraini

A. PENDAHULUAN

Politik strategi nasional merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan nasional. Politik menjadi suatu proses untuk menentukan tujuan, sedangkan strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan. Politik strategi nasional berperan penting dalam mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Salah satu perwujudan dari sistem politik strategi nasional adalah otonomi daerah. Dalam hal ini otonomi daerah diatur menurut UU No.32 Tahun 2004, dengan demikian masyarakat suatu daerah memperoleh kebebasan dalam mengatur dan membangun daerahnya. Otonomi daerah yang luas dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maka diperlukan *good governance* sebagai konsep pada otonomi daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang sehat dan bersih. Oleh Karena itu, ranah *good governance* tidak terbatas pada Negara atau birokrasi pemerintah, tetapi juga pada ranah masyarakat sipil yang dipresentasikan oleh organisasi non pemerintah dan sektor swasta. Semua unsur dalam pemerintahan bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, serta terbebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses dan laju pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

KBBI daring.

<https://www.gramedia.com/literasi/politik-adalah/>

<http://darmaprasajawahyudi2.blogspot.com/2013/06/dasar-pemikiran-penyusunan-politik-dan.html?m=1>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6116318/otonomi-daerah-pengertian-jenis-dan-tujuannya>

<https://www.merdeka.com/trending/tujuan-otonomi-daerah-menurut-uu-no-32-tahun-2004-ketahui-pengertian-dan-prinsipnya-klm.html?page=3>

<https://katadata.co.id/safrezi/berita/615ff9201f24a/pengertian-tujuan-dan-prinsip-otonomi-daerah>

<https://edukasi.okezone.com/amp/2022/12/09/624/2723575/3-asas-otonomi-daerah-dan-penjelasan-lengkapnya?page=2>

<https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/download/41/65/325->

[1?inline=1#:~:text=Dasar%20hukum%20dilaksanakan%20otonomi%20daerah,%20IV%2FMPR%2F2000%20tentang](https://publikasi.ubl.ac.id/index.php/Monograf/catalog/download/41/65/325-1?inline=1#:~:text=Dasar%20hukum%20dilaksanakan%20otonomi%20daerah,%20IV%2FMPR%2F2000%20tentang)

<https://plus.kapanlagi.com/arti-daerah-otonom-lengkap-dengan-jenis-manfaat-dan-contoh-tugasnya-a57fe5.html>

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-sebelas-maret/pendidikan-kewarganegaraan-pkn/makalah-kel10-politik-strategi-nasional-indonesia/36341064>

<http://darmaprasajawahyudi2.blogspot.com/2013/06/dasar-pemikiran-penyusunan-politik-dan.html?m=1>

<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

<https://www.ekrut.com/media/good-governance>

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-sebelas-maret/pendidikan-kewarganegaraan-pkn/makalah-kel10-politik-strategi-nasional-indonesia/36341064>

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-sebelas-maret/pendidikan-kewarganegaraan-pkn/makalah-kel10-politik-strategi-nasional-indonesia/36341064>

<https://www.slideshare.net/NatalKristiono/alaqsha-gilang-imantara>

<https://sg.docworkspace.com/l/sIJe6nc3MAfSb-aQG?sa=00&st=0t>

<https://www.studocu.com/id/document/universitas-jember/pengembangan-perangkat-pembelajaran/implementasi-politik-dan-strategi-nasional/26667862>



PENDIDIKAN ANTI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

Santi Rizki Fitriyani

A. PENDAHULUAN

Salah satu masalah terpenting yang harus diselesaikan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Hal ini disebabkan karena semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi, maka korupsi di Indonesia terjadi semakin luas di semua bidang dan sektor pembangunan, terutama setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang terkait berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kolusi dan Nepotisme dapat dikatakan sebagai asal mula dari lahirnya korupsi. Korupsi ialah merupakan perbuatan yang tidak baik dan tidak mencerminkan kebajikan kewarganegaraan (Civic Virtue).

Seperti menurut Rafi (2006), hlm 1) bahwa: “Korupsi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti, sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara.” Senada dengan hal itu, menurut Handoyo (2013, hlm. 1) menyatakan bahwa: “Korupsi sesungguhnya bukan merupakan penyakit diluar diri bangsa, korupsi adalah penyakit bawaan, sebab benih-benih korupsi sudah ada dalam tubuh bangsa Indonesia tidak hanya sejak era kolonial bahkan korupsi sudah berlangsung sejak masa kejayaan kerajaan-kerajaan nusantara.”

Berdasarkan hal itu apabila tidak dicegah dan ditanggulangi serta diberantas sampai akar-akarnya tidak menutup kemungkinan jika korupsi akan menjadi seperti bom waktu yang menggerogoti keutuhan tatanan

DAFTAR PUSTAKA

- Samuel P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, (New Haven: Yale University Press, 1977), hlm 37-39.
- Husaein Alatas, *The Sociology of Corruption*, (Singapore, Times Indonesia, 1993), h. 49-50.
- Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Antikorupsi*, (Jakarta: Zikru'l-Hakim, 1997), h. 137-140.
- Al. Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam beberapa aspek kajian*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1997, hlm. 51
- Petter Langseth, "Bagaimana Memerangi Langsung Praktek Korupsi", dimuat dalam *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 Januari – Maret 2000, hlm. 43-48
- Petter Langseth, R. Stapenhurst dan J. Pope, "The Role of National Integrity System in Fighting Corruption", EDI Working Paper, The Economic Development Institute of the World Bank, 1997
- Indriyanto Senoadji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Penerbit Konsultan Hukum Prof. Seno Adji dan Rekan, Jakarta, 2006
- https://www.academia.edu/18581998/Makalah_Korupsi_Kolusi_dan_Nepotisme_KKN
- http://repository.upi.edu/24129/4/S_PKN_1205628_Chapter1.pdf
- <https://tirto.id/pengertian-korupsi-kolusi-dan-nepotisme-hukum-pencegahan-kkn-gorh>
- <https://media.neliti.com/media/publications/243741-permasalahan-korupsi-kolusi-dan-nepotism-a86737af.pdf>



MASYARAKAT MADANI

Rahma Rahmatunisa

A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia sistem pendidikan nasional merupakan pranata sosial yang secara konstitusional diusahakan dan diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks itu, tujuan dan proses pendidikan seyogianya diarahkan untuk menghasilkan individu terdidik yang cerdas, yang dalam waktu yang bersamaan secara kolektif mampu membangun kehidupan bangsa Indonesia yang cerdas dan berkarakter Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus berfungsi secara optimal sebagai wahana utama dalam pembangunan bangsa dan karakter (nation and character building). Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas) dengan sistem pendidikan nasional diharapkan terwujudkan proses "berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab." Kualitas pribadi peserta didik sebagai anak bangsa dan pemilik masa depan bangsa yang ideal tersebut diyakini akan menjadi faktor determinan bagi tumbuh kembangnya bangsa dan negara Indonesia sepanjang zaman. meneladani Nabi bukan hanya penampilan fisik belaka, tapi sikap yang beliau peragakan saat berhubungan dengan sesama umat Islam ataupun dengan umat lain, seperti menjaga persatuan umat Islam, menghormati dan tidak meremehkan

DAFTAR PUSTAKA

- Kutut Suwondo, 2002. "Pluralitas Civil Society dab Upaya Demokratisasi Lokal", dalam Jurnal Analisis Sosial Vol. ke-7, No. 2. Juni. Trubus Rahardiansah. 2014. Pengantar ilmu Politik Paradigma, Konsep Dasar dan Relevanuinnya untuk Ilmu Hukum
- Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin 2014, Menghidupkan Kembali mu-ilmu Agama Bab 1. Terj. Jakarta: Republika.
- As-Shalabi, Ali Muhammad. 2012: Sejarah Lengkap Rasulullah Jilid ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- A-Shalabi, Ali Muhammad. 2008. Biografi Umar bin Khattab Jakarta Pustaka Al-Kautsar
- <https://www.studocu.com/id/document/universitas-lampung/pendidikan-kewarganegaraan/demokratisasi-menuju-masyarakat-madani/44506763>
- <https://www.gramedia.com/literasi/masyarakat-madani/>
- <http://kumpulan2makalahpai.blogspot.com/2015/12/institusi-penegak-masyarakat-madani-dan.html?m=1>

PROFIL PENULIS

Serlyi Febriyanti



Penulis lahir di Ranggung, 18 September 2002, lulusan Pesantren Daarul Abror Bangka Belitung. Dan sekarang sedang melanjutkan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam.

Cintia Dwi Mustika



Penulis lahir di Bandung 07 Juni 2004, lulusan Pondok Pesantren AR-Rahman Ibum dan sekarang sedang melanjutkan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Lembar kerja mahasiswa ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

Ghozy Amirulloh Halim



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 14 Februari 2001, jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN Cikancung 4, Mts Al-Haromain, dan dilanjutkan di SMA Kemala Bhayangkari. Dan sekarang sedang melanjutkan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Lembar kerja mahasiswa ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

Najwa Faridah Mahmud



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 06 September 2002, jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 2 Rajamandala kulon, MTS Al-Riyadl, SMA Al-Istiqomah. Dan sekarang sedang melanjutkan perkuliahan di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Lembar kerja mahasiswa/i ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti Perkuliahan Kewarganegaraan.

Lutfi Fadhilah Syukur



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 22 Februari 2004, jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN Bojongloa Kidul, Mts Nurul Ilham, dan dilanjutkan di Ma Baitul Hikmah Haur Kuning. Dan sekarang sedang melanjutkan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Lembar kerja mahasiswa ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

Mutia Mariska

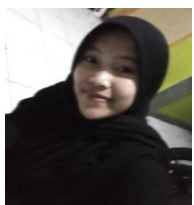
Penulis lahir di Sukabumi. Telah menyelesaikan pendidikan formal di SDN Cijambe, SMPN 10 Kota Sukabumi, MAN 2 Kota Sukabumi dan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung. Dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Lembar kerja mahasiswa ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

Yassifha Iqlima Azzahra



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 18 Oktober 2002, jenjang pendidikan Sekolah dasar di SDN Cikasungka, Mts Al-Hidayah, dan di lanjutkan di PPS MA-arrahman Ibun Majalaya. Dan sekarang sedang melanjutkan di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Lembar kerja mahasiswa ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

Neng Ayu Sulastri



Penulis lahir di Sumedang pada tanggal 17 April 2004. Anak kedua dari dua bersaudara. Menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN Cimanggung 3, kemudian melanjutkan ke SMPN Satu Atap Cimanggung, kemudian melanjutkan SMA ke SMAN Cimanggung, dan sekarang melanjutkan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka-Bandung mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam.

Sindi Anggraeni



Penulis lahir di Sumedang pada tanggal 24 Maret 2004, jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN Cimanggung 3, SMPN Satu Atap Cimanggung, dan dilanjutkan SMA PGRI Cicalengka. Dan sekarang sedang melanjutkan Kuliah di STAI AL-Fallah Cicalengka Bandung.

Syafna Camila Putri Utami

Penulis lahir di Bandung 13 April 2003, jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN Permata Hijau, SMP Bakti Nusantara 666, MA YPI Pulosari dan sekarang sedang melanjutkan pendidikan di STAI Al-Falah Cicalengka, Bandung dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Lembar karya ini merupakan tugas dari mata kuliah Kewarganegaraan.

Nandar Abdul Jabbar



Penulis lahir di Cianjur pada tanggal 01 Januari 2003, jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN Lokasari, MTS AT-Tawazun Islamic Boarding School, dan dilanjutkan di SMAIT AL-HUDA. Dan sekarang sedang melanjutkan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Lembar kerja mahasiswa ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

Ira Nuraini



Penulis lahir di Garut pada tanggal 11 Agustus 2004, jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN Situgede 4, SMPN 1 Karangpawitan, dan dilanjutkan di SMK-IT Rabbani Dan sekarang sedang melanjutkan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Lembar kerja mahasiswa ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

Santi Rizki Fitriyani



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 09 September 2003, jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN 11 Lembang, SMPN 6 Lembang, dan dilanjutkan di MA Sais School Soreang. Dan sekarang sedang melanjutkan kuliah di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Lembar kerja mahasiswa ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

Rahma Rahmatunisa



Penulis lahir di Bandung pada tanggal 08 September 2004, jenjang pendidikan sekolah dasar di SDN Lewilayung, SMPN 2 Rancaekek, dan dilanjutkan di Ma Wasilatul Huda. Dan sekarang sedang melanjutkan kuliah di STAI Al-falah Cicalengka Bandung dengan Jurusan Pendidikan Agama Islam. Lembar kerja mahasiswa ini merupakan karya tulis dalam rangka mengikuti perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

MATERI PKN

Untuk Mahasiswa di Perguruan Tinggi

Civic education, citizenship education, democracy education, mempunyai peran strategis dalam mempersiapkan warga negara yang intelek, bertanggungjawab serta beradab seperti yang dilakukan hampir oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia dalam peranan Pendidikan Kewarganegaraan. Sejalan dengan itu Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia harus menjadi tanggung jawab setiap komponen bangsa yaitu pemerintah, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, perguruan tinggi, serta masyarakat industri secara menyeluruh. Didalam Undang-Undang Sisdiknas di sana hanya mengatur Pendidikan Kewarganegaraan bagi pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi serta untuk pendidikan non formal. Karena itu, pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan di lembaga pendidikan formal ditujukan kepada peserta didik yang dibentuk dan diproses melalui kegiatan pembelajaran. Sementara Pendidikan Kewarganegaraan bagi masyarakat umum dirancang dan dibentuk secara bebas, secara ekstrakurikuler (diluar kurikulum) dan bertahap melalui proses program sosialisasi dengan berbagai macam pola media yang ada di masyarakatnya itu sendiri.